

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku literatur

- Adang, Y. A., *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009.
- Alatas, S. H., *Rasuah: Sifat, Sebab, dan Fungsi*, Dewan Bahasa, 1995.
- Hamzah, A., *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- , A., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Harahap, M., Y., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- , M. Y., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- , M. Y., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progresif)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hiariej, E. O., *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Husein, H. M., *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Indrayana, D., *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, Kompas, Jakarta, 2008.
- Kadow, H., *Yang Harus Anda Ketahui Ketika Dijadikan Saksi & Tersangka Korupsi*, Catatan Paralegal, Manado, 2016.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Muhardiansyah, D., Zulaiha, A. R., Susilo, W. D., Nugrahani, A., Rosalba, F. I., Barid, B., Oktirani, I, G, A, N, L., *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta, 2010.
- Ngani, N., Jaya, N, B., Madani, H., *Mengenal Hukum Acara Pidana Seri: 3 Tentang dam di Sekitar Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985.

- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani., *Metodologi Riset Hukum*, OASE PUSTAKA, Madiun-Surakarta, 2020.
- Sasangka, H., *Penyidikan Penahanan Penuntutan Dan Praperadilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Simanjuntak, N., *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Soekanto, S., & Mamudji, S., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sofyan, A., *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013.
- Susilo, E., *Permasalahan Praperadilan, Ganti Rugi, dan/atau Rehabilitasi Ditinjau dari Segi Teori, Norma, dan Praktik*, P.T. ALUMNI, Bandung, 2021.
- Taufik, I., Saputra. R., Arasull, B. K., Najmi., Fahmi, K., Afrizal., Refaldi, I. P., Putri, P. W., Azhar. V. D., *Perkembangan Lembaga Praperadilan: Hasil Eksaminasi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 97/Pid.Prap/2017/Pn/Jkt.Sel*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021.
- Tornado, A. S., *Praperadilan: Sarana Perlindungan Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2018.
- Wibowo, A., Ratnawati, Handayano, A. R., Fernando, Z. J., Elizawarda., Indriyanti, D., Hakim, A. L., Kurniadi, M. P. Y., Kristianto, J., Karim, A., Rafiqi, Y., Desmarnita, U., Setiawan, E. T., Solin, S. M., Wijayati, S., *Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2022.
- Widiarty, W. S., *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024.

b. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Nomor 7149).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4654).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012, Putusan Nomor 31/PUU-X/2012.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013, Putusan Nomor 44/PUU-XI/2013.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015, Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016, Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2017, Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 2024, Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt Sel.

c. Jurnal

- Afrizal, M., “Tinjauan Yuridis Terhadap Gelar Perkara dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Kasus LP/B-III/V/2022/SPKT/POLRES MUBA/POLDA SUMSEL di Polres Musi Banyuasin)”, *Yustisia Rahmadiyah*, Vol. 1 No. 1, 2024.
- Ante, S., “Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. 2 No. 2, 2013.
- Aprilia, S. S., Siregar, E., & Munandar, T. I., “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 4 No. 1, 2023.
- Az Zahra, K. H., Al Amjad, M. F. M., Maulidian, S. N., Silvia, S., & Asyifa, F. A., “Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmu Hukum: The Juris*, Vol. 8 No.1, 2024.
- Berutu, E. S., “Penangkapan dan Penahanan Tersangka Menurut KUHAP dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia”, *Lex Crimen*, Vol. 6 No. 6, 2017.
- Chiruddin, R. R., Jaya, N, S, P., & Sukinta., “Tinjauan Yuridis Penetapan Status Tersangka Sebagai Perluasan Objek Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014”, *Diponegoro Law Review*, Vol. 5 No. 2, 2016.
- Dewanti, P. A., Kanaya, R., Faradila, K., & Rachman, H., “Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Analisis Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Aparat Penegak Hukum”, *COURTREVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 5 No. 5, 2025.
- Eddi, Ali, D., Jafar, M., “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XII/2015 Tanggal 11 Januari 2017 Oleh Penyidik dan Jaksa Terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh”, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 3 No. 1, 2019.
- Essing, M. Alasan Hukum Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka/Terdakwa Korupsi,” *Lex Crimen*, Vol. 1 No. 4, 2012.
- Mappanturu, A.M.D, “Unsur Memperkaya dan Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain atau Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2021.
- Effendi, E., “Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2020.

- Harefa, A., Harefa, J. E., “Tiada Sesuatu Perbuatan Boleh Dijatuhi Pidana Melainkan Lewat Kekuatan Ketentuan Perundang-Undangan”, *JURRISH*, Vol. 4 No. 2, 2025.
- Hasbi, M., Lubis, M. D. A., & Sitompul, A., “Analisis Putusan Praperadilan dalam Kasus Pidana Pemalsuan Surat dan Pemalsuan Akta Autentik di Kota Medan”, *Jurnal Ilmiah Penelitian: Law Jurnal*, Vol. 6 No. 1, 2025.
- Loa, C, F., Rompas, D, D., & Kapugu, A, B., “Kajian Hukum Lembaga Praperadilan dalam Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)”, *LEX PRIVATUM*, Vol. 13 No. 04, 2024.
- Madyasto, G, Y., & Tornado A, S., “Problematisasi Putusan Pra Peradilan Pasca Putusan Lepas Mahkamah Agung Republik Indonesia”, *Badamai Law Journal*, Vol. 6 No. 1, 2021.
- Malaka, Z., Telaah Terhadap Banyaknya Permohonan Praperadilan yang Gagal, *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, Vol. 02 No. 1, 2024.
- Malaka, Z., & Isa, A., “Organisasi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Peradilan di Indonesia,” *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, Vol. 01 No. 01, 2023.
- Marpaung, B., “Memahami Pemenuhan Unsur Perbuatan Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Nalar Keadilan*, Vol.2 No. 2, 2022.
- Marsudin, Faisal, A., L. F., “Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Suatu Studi di Polda Sultra)”, *Sultra Law Review*, Vol. 3 No. 1, 2025.
- Maulidah, A. S., Wahyudi, S. T., “Problematisasi Penerapan Kebijakan Rehabilitasi dan Kompensasi Terhadap Narapidana Korban Salah Tangkap dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2022.
- Moningga, P, E, T., “Praperadilan Sebagai Mekanisme Kontrol Terhadap Tindakan Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Menurut Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014”, *Lex Crimen*, Vol. 6 No. 6, 2017.
- Motulo, P. H., Kumendong, W. J., Lembon, R. R., “Upaya Paksa dalam Proses Peradilan Pidana”, *Lex Administratum*, Vol. 8 No. 4, 2020.
- Mukminah, L. S., “Praperadilan Penetapan Status Tersangka Tidak Melalui Prosedur yang Sah dan Patut dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi”, *JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian*, Vol. 4 No. 4, 2025.
- Muttaqi, N. I. N., & Arpannuddin, I., “Kriteria Diskresi oleh Pejabat Pemerintahan sebagai Tindak Pidana Korupsi: Persinggungan

- Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara”, *Mendapo: Journal of Administrative Law*, Vol. 6 No. 1, 2025.
- Nasution, R. P., Milen, S., Ramadhan, K. I., Sitorus, K., & Chandra, A., “Praktek *Due Process of Law* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di Tinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023”, *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, Vol. 2 No. 1, 2024.
- Nusi, H. S., “Penangkapan dan Penahanan Sebagai Upaya Paksa dalam Pemeriksaan Perkara Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. 5 No. 4, 2016.
- Pradika, D.H., Sukinta, & Cahyaningtyas, I., “Tinjauan Tentang Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 11, No. 2, 2022.
- Purba, E, C, W., “Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Mengabulkan Permohonan Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/Pn Jak.Sel)”, *Jurnal Verstek*, Vol. 7 No. 3, 2019. Purba, H. A. H., Masu, R. R., & Medan, K.K., “Tinjauan Yuridis terhadap Kepastian Hukum dalam Proses Pembuktian Perkara Praperadilan di Indonesia”, *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 4 No. 2, 2025.
- Putri, D., “Korupsi dan Prilaku Koruptif”, *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, Vol. 5 No. 2, 2021.
- Pura, M, H., & Faridah, H., “Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 1, 2021.
- Rangka, G. J., Waha, C. J. J., & Gosal, V. Y., “Kewenangan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Melakukan Penyadapan terhadap Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Prinsip *Due Process of Law* Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019”, *Lex Privatum*, Vol. 15 No. 2, 2025.
- Risdiana & Taquiuddin, H, U., “Penerapan Asas Batas Minimal Pembuktian Dalam Perkara Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 55/Pdt.G/2020/Pn.Sel)”, *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Vol. 7 No. 2, 2021.
- Rohmad, J, F., Sjaifurrachman, Suhartono, S., “Problematisa Penyidikan Tindak Pidana dalam Penerbitan SPDP untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka”, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 12 No. 2, 2021.
- Roslonormansyah, Mahsuri, M., Ariesta W., “Ratio Detendi Ketercukupan Alat Bukti dalam Penetapan Tersangka Perkara

- Korupsi di Tingkat Penyidikan”, *Indonesia Journal of Islamic Jurisprudence: Economic and Legal Theory*, Vol. 3 No. 3, 2025.
- Rozi, F., “Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana”, *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 1 No. 2, 2018.
- Samurine, C. A., “Implementasi Sistem Pembuktian Terbalik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Lex Crimen*, Vol. 8 No. 3, 2019.
- Saragih, M. B. M. D., “Kewajiban Penyidik Menghentikan Proses Penyidikan Berdasarkan Putusan Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka yang Tidak Sah dan Berkekuatan Hukum”, *LOCUS: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2024.
- Sengi, E., “Benarkah Praperadilan Menguji Aspek Formil (Analisis Hukum Penetapan Tersangka dalam Putusan Nomor: 01/Pid.Pra/2021/PN.Tob)”, *Wajah Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2022.
- Sepang, O., “Perluasan Objek Praperadilan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014”, *Lex Administratum*, Vol. 6 No. 3, 2018.
- Sipayung, J., Suhaidi, Harianto, D., & Zulyadi, R., “Analisis Terhadap Putusan Hakim Praperadilan di Pengadilan Negeri Medan, *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2019.
- Sholihah, E. N., Santoso, B., “Praperadilan Berdasarkan Legalitas Penetapan Tersangka Ketiga Kalinya”, *Verstek*, Vol. 8 No. 3, 2020.
- Suherman, A., Penangkapan Sebagai Bentuk Upaya Paksa Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 29 No. 1, 2020.
- Sukono, S. J. D., & Santoso, B., “Analisis Efektivitas Praperadilan dalam Melindungi Hak Asasi Manusia di Sistem Peradilan Indonesia”, *Verstek*, Vol. 12 No. 1, 2024.
- Sumelang, C. P., “Kedudukan SPDP dalam Prapenuntutan Berdasarkan KUHAP (Kajian Putusan MK Nomor 130/PUU-XII/2015 Tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan SPDP)”, *Lex Crimen*, Vol. 7, No. 3, 2018.
- Susilo, E., Negara, D. S., Raf, M., Eksaminasi Keabsahan Penggeledahan dan Penyitaan dalam Praperadilan: Rekonstruksi Kewenangan dengan Pendekatan Plain View Doctrine Validity of Search and Seizure in Pre-Trial Proceedings: Reconstruction of Authority Using the Plain View Doctrine, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6 No. 7, 2025.

- Sutrisno, A., “Peran Hakim dalam Mewujudkan Due Process of Law pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia”, *LOCUS: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2025.
- Syauqi, A., Fasa, M, I., Suharto., Fachri, A., “Corruption Not a Taboo For Indonesian?”, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2022.
- Umam, K., Hadiyanto, A., Sukrisno, W. H., “Pertimbangan Putusan Hakim Pra Peradilan Mengenai Sah Tidaknya Penetapan Tersangka”, *Journal Juridisch*, Vol. 3 No. 2, 2025.
- Vilani, D, R., Yunita, N, K., Nanda, A, L., & Wijaya, D, A., “Mekanisme Penyelidikan, Penyidikan dan Mengadili di Indonesia Pasca Orde Baru”, *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH)*, Vol. 2, No. 2, 2023.
- Wulandari, A., & Wiraguna, S. A., “Problematisasi Penerapan Prinsip *Due Process Of Law* dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi”, *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol. 2 No. 2, 2025.

d. Skripsi

- Agustina, Inanda, Penolakan Permohonan Praperadilan Atas Penetapan Status Tersangka (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 02/Pid.Pra/2015/PN.Pwt), *Skripsi*, Universitas Jenderal Soedirman, 2016.
- Putri, A. A., Akibat Hukum Putusan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Nomor Perkara 3 6/Pid.Pra/2021/PN Tjk), *Skripsi*, Universitas Lampung, 2023.

e. Media online

- Brahmana, H. S., 17 April, Teori dan Hukum Pembuktian, https://www.pnlhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77_20170419145829_Teori%2Bdan%2BHukum%2BPembuktian.pdf, diakses pada 03 September 2025.
- Rahim, M. I, F., 13 Desember 2022, Waktu Gugurnya Permohonan Pra Peradilan, <https://ptsp.kejaksaan.go.id/kegiatan/waktu-gugurnya-permohonan-pra-peradilan>, diakses 15 Desember 2025.
- Ristiyanti, J., Berkas Perkara Tom Lembong Akan Dilimpahkan ke Pengadilan Pekan Ini, <https://www.tempo.co/hukum/berkas-perkara-tom-lembong-akan-dilimpahkan-ke-pengadilan-pekan-ini-1212189>, diakses pada 16 Desember 2025.
- Waruwu, R. P. R., 08 Agustus 2017, Praperadilan Pasca 4 Putusan MK, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/Praperadilan%20Pasca%204%20Putusan%20MK.pdf>, diakses pada 27 Agustus 2025.